

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan Desa di Indonesia. Oleh karena itu berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan Pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengentasan masyarakat miskin untuk mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan yang lain, sehingga memerlukan kebijakan yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin tersebut. Pengalaman lapangan banyak memberikan gambaran bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat sering menimbulkan resistensi tidak saja pada pejabat pelaksana kebijakan tetapi juga sinergi kelembagaan program dengan pemerintah daerah serta kelompok sasaran, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat di implementasikan dengan baik.

Sementara itu keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi, termasuk dalamnya adalah pemahaman kebijakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan secara sadar oleh masyarakat.

Dalam konteks ini program bantuan langsung masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) menandai keseriusan pemerintah untuk mengubah logika pendekatan proyek menjadi program dengan melakukan konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses

perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.¹

Tujuan dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terbagi menjadi dua yaitu tujuan umumnya Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dan tujuan khususnya terdiri dari :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan diakses tanggal 24 Agustus 2014

4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.²

Pendekatan *top-down* yang sejak lama dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan banyak mendapat kritik dari berbagai pihak karena dinilai pengaturan dalam pelaksanaan program semuanya dikendalikan oleh pemerintah lewat organisasi-organisasi sebagai pelaksana dan pengawas. Kondisi seperti ini dapat membuat masyarakat menjadi tidak berdaya dan tidak dilibatkan secara aktif. Kondisi masyarakat yang umumnya miskin dan tak berdaya membuat masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

PNPM-MPd ini juga diterapkan di Kabupaten Sampang khususnya Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong yang di harapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk

² <http://pnpm-jatim.blogspot.com/p/tentang-pnpm.html> diakses 24 Agustus 2014

berpartisipasi dan mandiri dalam mengambil keputusan, ekonomi dan infrastruktur mereka sendiri.

Seperti di ketahui pelaksanaan PNPM di Kabupaten Sampang mendapat sorotan, seperti yang di beritakan Majalah Parlemen Sampang “Mimbar Aspirasi”, banyak aduan masyarakat terkait Pengerjaan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri di Kabupaten Sampang yang disinyalir asal-asalan. Hal itu seperti yang disampaikan Komisi C DPRD Sampang yang menerima pengaduan dari masyarakat.³

Desa Dharma Tanjung adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Camplong yang telah menjalankan program PNPM-MPd ini, Desa Dhrma Tanjung menjadi salah satu tempat yang menjadi prioritas pelaksanaan program PNPM-MPd ini terkait rasio kemiskinan dan desa tertinggal yang ada di desa tersebut hal ini bisa di lihat dari timpangnya kesejahteraan di antara mereka :

Tabel 1.

Kesejahteraan Keluarga Desa Dharma Tanjung Tahun 2013

| No | Kesejahteraan Keluarga | Jumlah |
|------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Keluarga pra sejahtera | 943 keluarga |
| 2 | Keluarga sejahtera 1 | 920 keluarga |
| 3 | Keluarga sejahtera 2 | 282 keluarga |
| 4 | Keluarga sejatera 3 plus | 112 keluarga |
| Total jumlah kepala keluarga | | 2292 keluarga |

Sumber : Dokumen Desa Dharma Tanjung 2014

³ Majalah “Mimbar Aspirasi” Juli 2014 Edisi VII; hlm.3

Adapun program yang sudah berjalan di desa Dharma Tanjung yaitu terbagi dua yaitu pertama pembangunan ekonomi yaitu program yang bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat, dengan cara memberdayakan masyarakat itu sendiri yaitu SPP (Simpan Pinjam Perempuan) . Kedua yaitu pembangunan fisik sarana/prasarana seperti pengaspalan jalan.

Peneliti merasa tertarik untuk meneliti implementasi program PNPM-MPd terutama terkait program pembangunan infrastruktur yaitu pengaspalan jalan di Dusun Daman Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang melatar belakangi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) pada program pengaspalan jalan di Dusun Daman Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Tahun 2014 ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) pada program pengaspalan jalan di Dusun Daman Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Tahun 2014 ?

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan bisa di dapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) pada program pengaspalan jalan di Dusun Daman Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) pada program pengaspalan jalan di Dusun Daman Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan bisa di dapatkan dari penelitian ini adalah :

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa Dharma Tanjung dan Kecamatan Camplong dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut asal katanya *empowering* dari bahasa Inggris *empower* yang artinya “menugaskan atau memberi wewenang”. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja, dan keadilan dan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

Menurut Mc Ardle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.⁴

Selanjutnya Shardlow melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.⁵

Selanjutnya Moebiyarto menjelaskan bahwa, pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan

⁴ Sedarmayanti. 2014. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung : Mandar Maju. hal. 117.

⁵ Adi, Isbandi Rukmianto. 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hal. 78.

akses dan kontrol atas sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial, sehingga kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.⁶

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi , maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampi menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

b. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*buttom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

⁶ Fahrudin, Adi. *Pemberdayaan, Partisipasi, Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora: Bandung, hal 49.

2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.⁷

c. Tolak Ukur Pemberdayaan Masyarakat

Sani menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pengorganisasian masyarakat

Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat dapat diorganisasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi ini

⁷ Sutrisno, D. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut kabupaten Semarang*. Semarang: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

merupakan alat bagi masyarakat menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.

2. Penguatan kelembagaan

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur : pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya penguatan kelembagaan banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding. Keterampilan dalam hal ini mencakup latihan kepemimpinan, penerapan organisasi dan manajemen keuangan, studi banding dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

3 Manajemen sumber daya

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang

ada menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.⁸

2. Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

a. PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

⁸ Sani, M.Y. 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan*. Makassar : Laboratorium Pembangunan Masyarakat. Program Pascasarjana UNHAS.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah :

1) Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2) Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin

- melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
 - e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
 - f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
 - g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.⁹

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan

⁹ <http://www.pnpm-mandiri.org/> diakses tanggal 27 Agustus 2014

program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya.

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahir pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai

bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.

Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.

Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri - 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

b. PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :

- a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan,
- b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat

(capacity building), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (Corporate Social Responsibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

a. Program-Program Pendukung PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, terdapat beberapa program pendukung sebagai upaya untuk menangani persoalan kemiskinan secara lebih serius dengan pola dan pendekatan yang

lebih khusus. Program-program tersebut adalah : PNPM Generasi, PNPM P2SPP, PNPM RESPEK, PNPM R2PN dan PNPM Mandiri Pasca Bencana.

1) PNPM Mandiri Generasi

PNPM Generasi merupakan program uji coba inovatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia di bulan Juli 2007, yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tiga Tujuan Pembangunan Milenium: Pendidikan dasar universal, penurunan tingkat kematian anak, peningkatan kesehatan ibu. PNPM Generasi adalah singkatan dari PNPM Generasi Sehat dan Cerdas.

2) PNPM Mandiri P2SPP

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) merupakan program yang digagas Tim Koordinasi PNPM-PPK Nasional sebagai upaya nyata untuk melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang lebih luas, yang juga diterapkan dalam program pembangunan reguler di daerah.

P2SPP diluncurkan pada Bulan Mei 2006. Sebagaimana dasar pemikiran awal, ruang lingkup P2SPP meliputi

:

a) pemantapan peran aparat pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui setrawan,

b) mengupayakan pengintegrasian prinsip dan prosedur pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini prinsip dan prosedur PNPM-Perdesaan) kedalam sistem pembangunan reguler,

c) pemberian stimulan berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten,

d) serta memfasilitasi review Peraturan Daerah yang mengakomodir upaya pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis masyarakat.

3) PNPM Mandiri R2PN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias merupakan salah satu sub program di dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Program ini diinisiasi dalam upaya penanganan kemiskinan secara lebih serius dan khusus kepada masyarakat Pulau Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami akhir tahun 2004. Sebelum diluncurkannya program ini, dalam kondisi masih darurat, penanganannya dilakukan dengan program PPK Pasca Bencana yang berlangsung selama tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya mulai tahun 2007, PPK Pasca Bencana digantikan dengan program R2PN. Program ini menangani dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nias dan Nias Selatan, yang terdiri dari 9 kecamatan.

4) PNPM Mandiri RESPEK

Program ini merupakan sub program dari PNPM Mandiri Perdesaan. RESPEK (Rencana Strategi Pengembangan Kampung),

merupakan pola penanganan khusus PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Papua dan Papua Barat dengan sumber pendanaan dari dana Otonomi Khusus.

5) PNPM Mandiri Pasca Bencana

Program ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang difokuskan secara khusus untuk menangani masyarakat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilanda bencana. Dua provinsi yang saat ini menjadi wilayah kegiatan PNPM Mandiri Pasca Bencana adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat.

Tiga logo yang sering dipergunakan dalam berbagai aktivitas program.

Gambar 1.1
Logo PNPM



c. Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan

Prinsip PPK (Panitia Pengelola Kegiatan) /PNPM Mandiri

Perdesaan menekankan beberapa prinsip sebagai berikut ini :

1. Transparansi

Setiap kegiatan program, pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

2. Keberpihakan pada Orang Miskin

Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dari kelompok kurang mampu.

3. Partisipasi/Pelibatan Masyarakat

Setiap kegiatan harus melibatkan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu dan kaum perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, juga pengelolaan dan pengawasan/evaluasi. PPK memiliki mekanisme khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan, yakni Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).

4. Kompetisi Sehat untuk Dana

Harus ada kompetisi sehat antardesa untuk menentukan alokasi penggunaan dana PPK.

5. Desentralisasi

PPK memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan, berdasarkan prioritas kebutuhan dan manfaatnya bagi

masyarakat banyak. Masyarakat diberi kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri dan partisipatif.

6. Akuntabilitas

Masyarakat harus memiliki akses memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

7. Keberlanjutan

Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip PNPM-Perdesaan terdiri dari Prinsip-Prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM-PPK, yakni:

a. Bertumpu pada Pembangunan Manusia

Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

b. Otonomi

Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

c. Desentralisasi

Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.

d. Berorientasi pada Masyarakat Miskin

Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

e. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat

Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.

f. Kesenjangan dan Keadilan Gender

Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.

g. Demokratis

Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

h. Transparansi dan Akuntabel

Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif.

i. Prioritas

Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

j. Kolaborasi

Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

k. Keberlanjutan

Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan

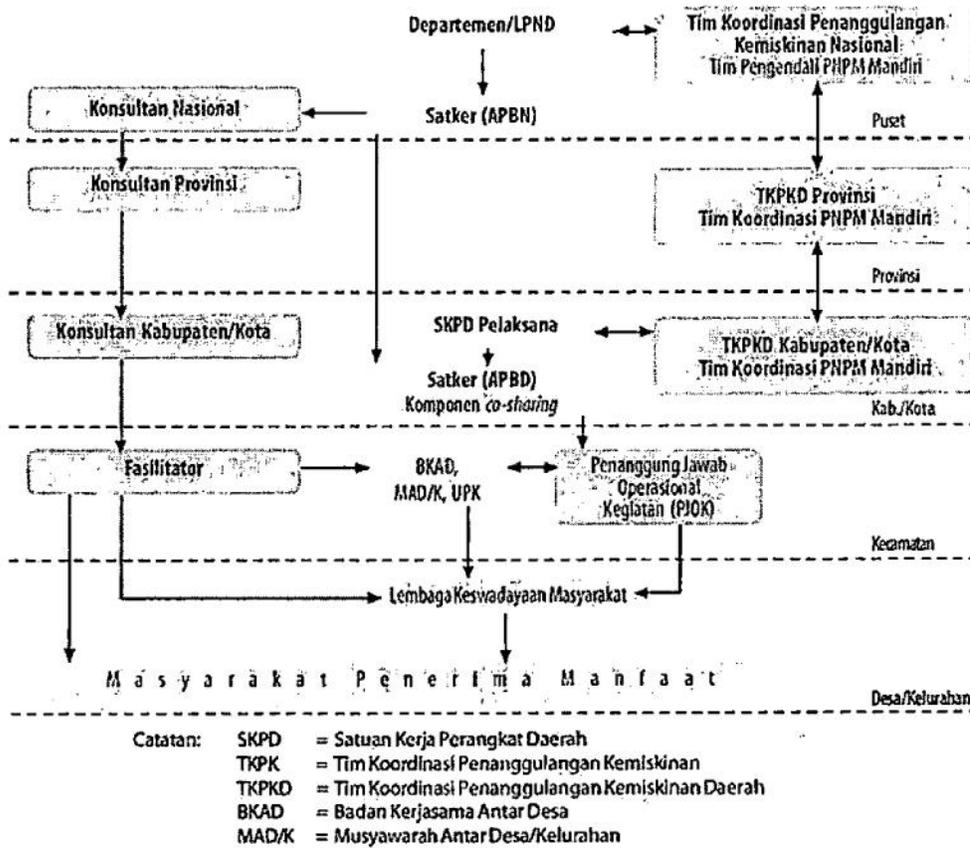
masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

d. Pengelolaan PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan

PPK/ PNPM-Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana (*executing agency*). Dalam membantu pengelolaan program secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi (TK) yang terdiri dari Kantor Menko Kesra, Bappenas, Depdagri, Depkeu, dan Dep. Kimpraswil, di berbagai level pemerintahan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) program atau disebut Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PjOK).

Gambar 1. 2

Struktur Manajemen PPK/PNPM-Perdesaan



e. Cara Kerja PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan

PPK/PNPM-Perdesaan memiliki kesamaan tujuan, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan dalam sebuah siklus kegiatan. Tahap-tahapan tersebut adalah:

1. Diseminasi Informasi dan Sosialisasi

Tahapan ini dilakukan dalam beberapa cara: lokakarya di berbagai level

pemerintahan, *hearing* anggota legislatif di berbagai jenjang, dan forum-forum musyawarah masyarakat. Setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media (penyebaran) informasi. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak (media massa, NGO, akademisi, anggota dewan).

2. Proses Perencanaan Partisipatif

Dilaksanakan mulai dari tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa (FD) untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas usulan desa. Dengan difasilitasi FD, masyarakat desa bermusyawarah menentukan jenis kegiatan yang akan diusulkan mewakili desa. Program menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

3. Seleksi Proyek di Tingkat Desa dan Kecamatan

Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan antardesa (kecamatan) untuk memutuskan usulan prioritas dan layak didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan

memutuskan jenis kegiatan. Forum antardesa terdiri dari wakil-wakil dari desa. Pilihan proyek adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.

4. Masyarakat Melaksanakan Proyek

Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa-desa yang terdani. Fasilitator Teknis program akan mendampingi TPK dalam mendisain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat.

5. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan

Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa, yakni sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa, dan Tim Pemelihara Kegiatan.¹⁰

¹⁰ <http://www.pnpm-perdesaan.or.id/> diakses tanggal 27 Agustus 2014

f. Monitoring dan Evaluasi

PPK/PNPM-Perdesaan bekerja di wilayah beresiko tinggi. Dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan semestinya, program menerapkan sistem pengawasan berlapis.

1. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat

Pemantauan paling efektif adalah pemantauan oleh penerima manfaat program, yakni masyarakat. Program mengajak masyarakat terlibat langsung, memilih sendiri badan (komite) pemantau untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan proyek di lokasinya. Anggota dari komite pemantau juga turut mengecek harga, penawaran, pasokan barang, manfaat kegiatan bagi masyarakat, pembukuan dan status kemajuan kegiatan. Setiap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di masing-masing desa berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana program. TPK melaporkan minimal dua kali kepada masyarakat dalam forum musyawarah pertanggung jawaban. Program mewajibkan semua informasi terkait proyek harus diumumkan pada Papan Informasi di setiap desa.

2. Pemantauan oleh Pemerintah

Dana program merupakan dana publik, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku, memastikan dana tersebut dimanfaatkan sebagaimana

mestinya. Semua jajaran pemerintah (DPRD, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Bupati, Camat, PjOK) memiliki tanggung jawab sama untuk memantau pelaksanaan kegiatan program di wilayah masing-masing.

3. Pemantauan oleh Konsultan

Pemantauan kegiatan program tentunya merupakan tanggung jawab bersama konsultan dan fasilitator di berbagai jenjang. Para konsultan dan fasilitator melakukan kunjungan rutin ke lokasi kegiatan untuk memberikan pendampingan teknis dan supervisi.

4. Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Masalah

Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada fasilitator program, staff pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau langsung ke Pusat. PPK/ PNPM-Perdesaan membentuk Unit Penanganan Pengaduan & Masalah di tingkat pusat dan regional untuk mencatat dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat.

5. Pemantauan Independen oleh LSM/Jurnalis

PPK/ PNPM-Perdesaan bekerjasama dengan beberapa LSM yang cakap di setiap provinsi untuk melakukan pemantauan rutin secara independen. Program juga terus mengupayakan mengundang jurnalis untuk memantau, memberitakan

dan menyiarkan berita mengenai temuan-temuan mereka di lapangan.

6. Kajian Keuangan dan Audit

Sejumlah pihak secara rutin melakukan pemeriksaan dan audit program, yakni:

1. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), lembaga audit milik pemerintah. Setiap tahun BPKP mengaudit lima persen sampel kegiatan program.
2. Unit Pelatihan dan Supervisi Keuangan. Program memiliki staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan keuangan/ *on-the-job training* bagi Unit Pengelola Keuangan (UPK), TPK dan kelompok pemanfaat pinjaman ekonomi.
3. Misi Supervisi Bank Dunia. Bank Dunia bersama-sama Konsultan Manajemen Nasional PNPM-Perdesaan dan pemerintah melakukan misi supervisi per semester. Misi tersebut membantu identifikasi isu-isu manajemen dan mengevaluasi kemajuan program, mulai dari tingkat pusat hingga desa.
4. Audit Silang oleh Pelaku PPK di Desa/ Kecamatan. Para pelaku program di lapangan juga kerap melakukan audit silang antardesa atau antarkecamatan. Baik antardesa dalam satu kecamatan maupun kecamatan lain, atau antar

kecamatan di satu kabupaten atau kabupaten berbeda. Audit meliputi kemajuan dan kualitas kegiatan, pengelolaan keuangan dan pembukuan. Audit silang ini efektif dalam menjaga konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat, serta menjadi media saling bertukar pengalaman antar pelaku program.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster sebagai berikut:

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying*

out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).¹¹

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.¹²

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.¹³

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

b. Model Implementasi Kebijakan

1. Model George Edward III

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu,

¹¹ Abdul Wahab, Solichin. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

¹² Ibid; hlm.65

¹³ Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing

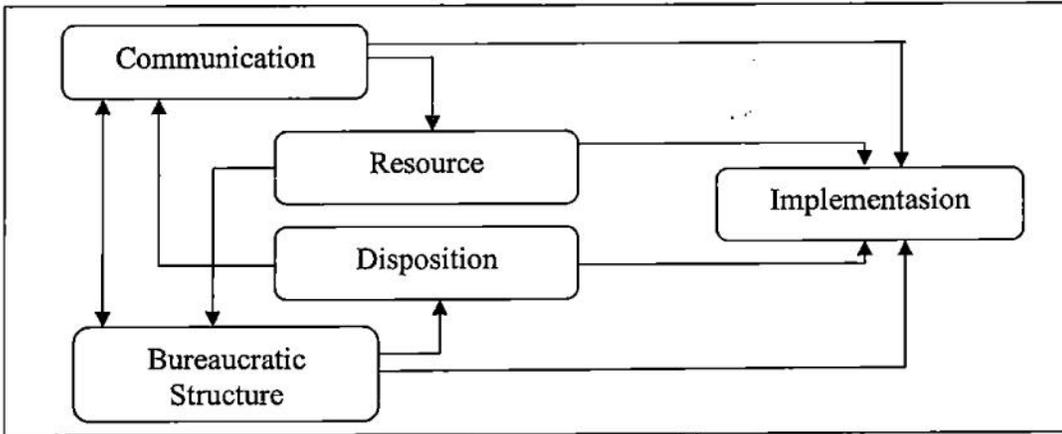
diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition*, dan *bureaucratic structure*.

Gambar 1.3
Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, Joko.¹⁴

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).¹⁵

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

¹⁴ Ibid; hlm 107

¹⁵ Ibid; hlm 97

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa:

“bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”.¹⁶

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

¹⁶ Ibid; hlm.98

Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang

layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3) Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

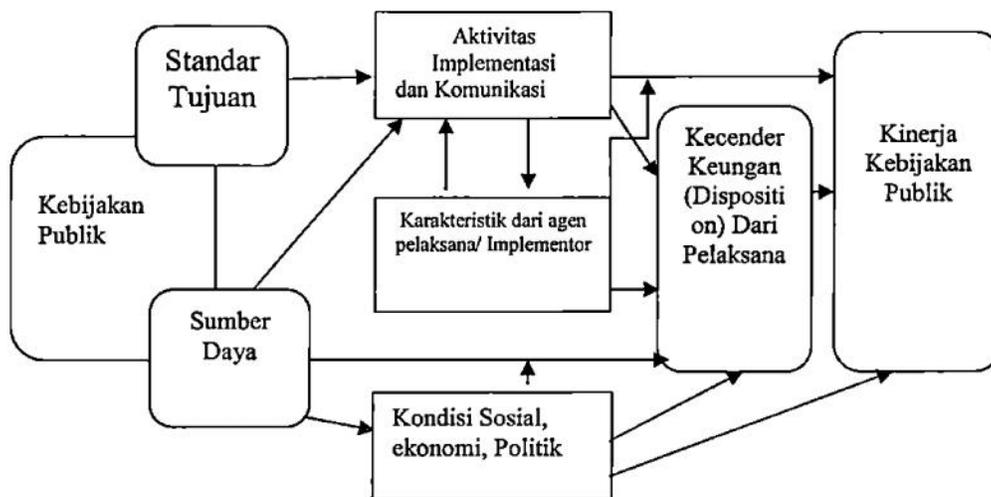
2. Model Meter dan Horn

Meter dan Horn menggambarkan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan.¹⁷

Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara *linier* dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Berikut beberapa faktor yang saling mempengaruhi, yang bisa dilihat melalui gambar 1.4

Gambar 1.4

Model Implementasi Menurut Meter dan Horn



Sumber: Dwidjowijoto¹⁸

¹⁷ Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia, hlm. 19.

¹⁸ Dwidjowijoto dan Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang : Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, hlm.128.

Menurut Wibawa berdasarkan model tersebut, suatu kebijakan haruslah menegaskan standard dan sasaran tertentu yang mesti dicapai oleh para pelaksana kebijakan, Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atau tingkatan ketercapainya standard dan sasaran tersebut.¹⁹

Standar dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan konkret. Kemudian kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia seperti dana atau intensif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersediakan oleh Pemerintah secara memadai. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi juga akan mendukung ke efektifan dan implementasi kebijakan. Semua pelaksana harus memahami apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang rumit, karena dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam penyampaian maupun penerimaan tugas dan tanggung jawab. Karakteristik dari agen pelaksana (implementor) sangat terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik agen pelaksana menurut Subarsono adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi atau program:

¹⁹ Op.Cit., hlm.19.

3. Model Mazmanian dan Sabatier

Model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang di perkenalkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

- a. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki.
- b. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.
- c. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas

kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.²⁰

4. Model Hoogwood & Gun

Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun mengetengahkan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- a. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- c. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang ada.
- e. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.

²⁰ Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, hlm.129.

- f. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- g. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Syarat kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Syarat kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.²¹

5. Model Merilee S. Grindle

Model Grindle ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan”. Dalam model Grindle tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan

²¹ Ibid; hlm 131

- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Pelaksana program, dan
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.²²

6. Model Elmore, Lipsky, Hjern & O'Porter

Model implementasi kebijakan yang disusun oleh Richard Elmore , Michael Lipsky dan Benny Hjern & David O'Porter bahwa "Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat didalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang dimiliki".

Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya ditataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah

²² Ibid; hlm 134

yang menjadi pelaksanaannya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat.²³

7. Model Jan Merse

Jan Merse mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan Jan Merse dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Informasi
- b. Isi kebijakan
- c. Dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan
- d. Pembagian potensi

Khusus dukungan masyarakat, berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pelaksanaan program. Penegasan di atas membuktikan bahwa setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder*.²⁴

8. Model Warwic

Warwic mengatakan bahwa “Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: a) kemampuan organisasi, b) informasi, c) dukungan, dan d) pembagian potensi”.²⁵

²³ Ibid; hlm 134

²⁴ Nyimas Dwi Koryati dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI, hlm.16.

²⁵ Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.99.

9. Model Rippley dan Franklin

Menurut Rippley dan Franklin bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor, yaitu:

- a. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparaturnya pelaksana.
- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, dan
- c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.²⁶

10. Model Charles Jones

Charles Jones mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.²⁷

²⁶ Ibid; hlm. 99

11. Model Goggin, Brown, dkk.

Goggin, Brown, dkk. dalam bukunya *Implementation Theory and Practice Toward a Third Generation*, secara implisit mensyaratkan tiga hal penting dalam implementasi kebijakan, yakni: 1) isi pesan, 2) bentuk pesan, 3) persepsi mengenai pimpinan negara.²⁸

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai faktor yang terlibat didalam pelaksanaan program PNPM-MPd, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian. Faktor ini sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh George Edwards III yang menjadi teori yang penulis pakai dalam penelitian ini.

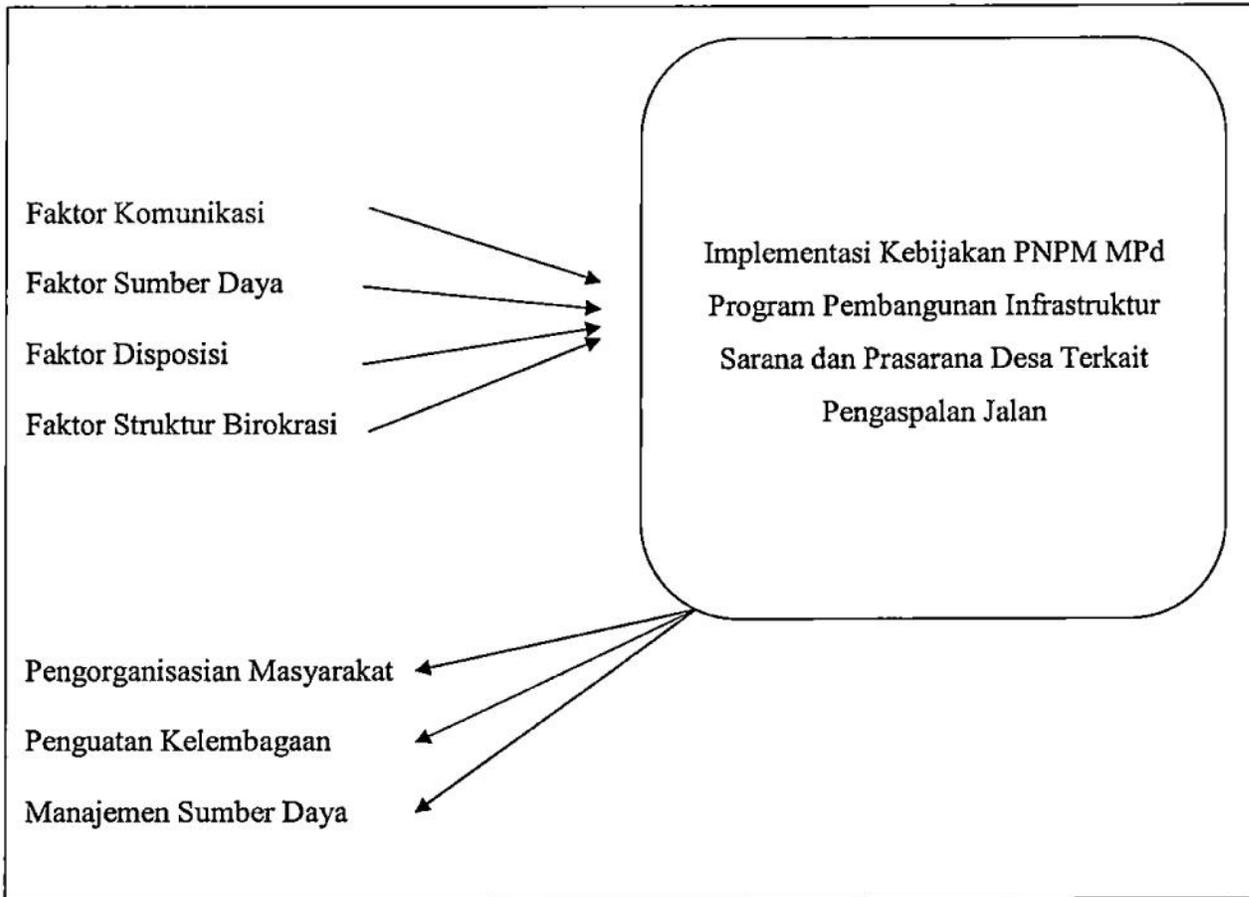
Berdasarkan pendekatan Edwards III dapat menjadi faktor pendukung apabila semua berjalan dengan lancar, tetapi apabila tidak maka akan menjadi faktor penghambat. Variabel tersebut yaitu : 1. Komunikasi, 2. Sumber Daya, 3. Disposisi, dan 4. Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi 1. Pengorganisasian Masyarakat, 2. Penguatan Kelembagaan dan 3. Manajemen Sumber Daya

²⁷ Jones, Charles O. 1986. *An Introduction to the study of public policy*, terjemahan Ricky Istamto. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.296.

²⁸ Goggin, Malcolm L., et al. 1990. *Implementation Theory and Practice: Toward and Third Generation*. Illinois: Scoot, Foresman and Company.

Kerangka dasar teori dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

1. Definisi Konseptual

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

b. PNPM-MPd

PNPM-MPd adalah merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi operasional dari implementasi kebijakan PNPM-MPd adalah sebagai berikut :

- a. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yaitu dana untuk kegiatan pembangunan,
- b. Dana Operasional Kegiatan (DOK) yaitu kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*)
- c. Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Sedangkan definisi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program PNPM-MPd adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

1. Transmisi Komunikasi yaitu terkait dengan alur sosialisasi pelaksana.
2. Kejelasan Informasi dan konsistensi pelaksanaan program yaitu terkait dengan usaha pelaksana dalam memberikan pemahaman atas kebijakan program pengaspalan jalan.

b. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia, yaitu terkait tentang jumlah pelaksana dan kualitas pelaksana.
2. Sumber Daya Material yaitu terkait dengan alokasi dana dan fasilitas dalam pelaksanaan program.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dukungan, respon dan *feedback* pelaksanaan yaitu terkait dengan sikap pelaksana, pelayanan pelaksana, *feedback* dan sikap pemahaman pelaksana dan pelaksana program.

d. Struktur Birokrasi

Standard Operational Prosedur (SOP)

Sedangkan definisi operasional dari tolak ukur pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pengorganisasian Masyarakat yaitu peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian.
- b. Penguatan Kelembagaan yaitu penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur : pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada.
- c. Manajemen Sumber Daya yaitu menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak menggunakan angka-angka untuk ditarik kesimpulan, dan pada umumnya menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami atau tentang pengaruh yang sedang bekerja.²⁹

²⁹ Tatang, M Arifin.1986. *Menyusun Rencana Penelitian*, CV Rajawali hal. 124

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan-bahan dokumentasi terhadap kasus yang di ambil oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian studi kasus. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulam data melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Wawancara merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui perbincangan dengan responden secara langsung dalam bentuk tanya jawab yang kemudian hasil data tersebut akan diolah dan dianalisis. Adapun yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjung, UPK, TPK, Fasilitator, MPd dan Tokoh Masyarakat.

Dokumentasi merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen atau catatan yang berguna bagi

penelitian. Peneliti mengakses tentang program PNPM-MPd Desa Tanjung terkait pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yaitu pengaspalan jalan, data diambil melalui dokumen perangkat desa, majalah, website dan serta media referensi lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dari uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif artinya data diperoleh dari dokumen berupa jawaban-jawaban atau keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka.

Sedangkan teknik analisis yang digunakan dari penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, dikelompokkan atau diinterpretasikan berdasarkan sifat data kemudian diadakan interpretasi terhadap data didasarkan pada fakta yang ada serta didukung oleh pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil yang berbobot.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam wujud skripsi yang terdiri dari empat bab dan tiap bab akan dirinci menjadi beberapa sub bab.

Bab I (Pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, kerangka dasar teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II (Deskripsi Objek Penelitian) akan menguraikan tentang daerah Kecamatan Camplong Desa Tanjung.

Bab III (Hasil Penelitian dan Analisis) akan menguraikan analisa data dan pembahasan atas hasil pengolahan data yang didapatkan dari penelitian. Analisis data bedasarkan atas parameter utama dan indikator yang mempengaruhinya. Parameter utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan program pengaspalan jalan PNPM-MPd dengan indikator Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Dana Operasional Kegiatan (DOK) dan Pendampingan Masyarakat.

Bab IV (Penutup) akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.